

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini dengan pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai kebijakan-kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya. Mengingat potensi disetiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerah masing-masing. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal pemerintah daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat meminimalisai ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu yang pertama adalah mengupayakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak

bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Upaya yang kedua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan daerah antara lain PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Bab IV Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga) merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan. Berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas *public service* dan sebagian keuntungan wajib disetorkan ke daerah.

d. Sumber-sumber lain PAD yang sah

Sumber-Sumber Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan-penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti : jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan

Untuk mengetahui kondisi secara umum PAD Provinsi di Indonesia, dapat dilihat pada realisasi PAD Provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah**  
**33 Provinsi di Indonesia**  
**(dalam ribu rupiah)**

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Kontribusi
2012	186.010.396.198	86.541.912.951	47%
2013	205.780.279.058	101.596.400.437	49%
2014	233.277.408.354	121.450.818.035	52%
2015	242.706.379.550	127.497.344.793	53%
2016	279.342.528.314	138.505.621.253	50%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2012-2016 (diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat, kontribusi PAD pada lima tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dalam penerimaan pendapatan daerah pada 33 Provinsi di Indonesia menunjukkan tren yang selalu fluktuatif secara kontribusi, angka tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2015 dengan kontribusi mencapai 53% dan angka terendah di tahun anggaran 2012 dengan 47% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 50% pertahun.

Dari PAD tersebut, dapat dilihat kontribusi sektor pajak dalam struktur PAD seperti yang terdapat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2**  
**Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD**  
**33 Provinsi di Indonesia**  
**(dalam ribu rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi
2012	86.541.912.951	72.996.679.774	84%
2013	101.596.400.437	86.979.670.640	86%
2014	121.450.818.035	103.087.606.002	85%
2015	127.497.344.793	107.892.424.971	85%
2016	138.505.621.253	117.025.492.117	84%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2012-2016 (diolah)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat, bahwa sektor pajak daerah merupakan sektor utama dalam penerimaan pendapatan asli daerah, kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah pada lima tahun terakhir sejak tahun

2012 sampai dengan tahun 2016 pada 33 Provinsi di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif. Sebab salah satu komponen terbesar dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2013 dengan kontribusi mencapai 86% dengan angka terendah dicapai pada tahun 2012 dan tahun 2016 dengan kontribusi hanya mencapai 84% dan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 85% pertahun.

Pada tahun 2016 penerimaan pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang bersumber dari pajak daerah sebesar 117.025.492 juta rupiah. Penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah secara umum relatif tinggi diperoleh provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Capaian tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (27,35 persen) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (12,76 persen), Jawa Timur (10,75 persen) dan Jawa Tengah (10,30 persen). Sedangkan capaian terendah dicapai oleh Provinsi Maluku Utara (0,16 persen), Provinsi Sulawesi Barat (0,208 persen), Provinsi Papua Barat (0,209 persen) dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,26 persen (BPS, 2016).

Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tentu turut ditentukan oleh kondisi perekonomian di sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktifitas ekonominya tersebut. Ukuran dalam menentukan seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa

daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah Provinsi di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi di Indonesia periode 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi di Indonesia periode 2012-2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul didalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi di Indonesia periode 2012-2016.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi di Indonesia periode 2012-2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak daerah, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pajak daerah provinsi di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu. Data sekunder yang digunakan yaitu gabungan dari data *time series* rentang waktu 2012-2016 dan data *cross section* meliputi 33 provinsi di Indonesia, sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah  $5 \times 33 = 165$  observasi.

Sumber data dalam objek penelitian ini diperoleh dari *website*, jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu dan instansi yang terkait dalam penelitian seperti badan pusat statistik (BPS) Indonesia. Adapun data yang digunakan adalah pajak daerah, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan



jumlah penduduk di 33 provinsi Indonesia dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2016.

## 2. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah adalah analisis regresi data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut:

$$TAX_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 POP_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

TAX	= penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia
PDRB	= PDRB untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
POP	= jumlah penduduk untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
$\alpha$	= intersep atau koefisien
$\beta_1, \beta_2$	= koefisien regresi variabel bebas
i	= data cross section Provinsi di Indonesia
t	= data time series, tahun 2012-2016
$\mu_{it}$	= faktor gangguan di waktu t untuk unit <i>cross section</i>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai topik dari skripsi yang dapat membantu penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, metode analisis data serta estimasi model regresi dengan panel data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan